

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

5

Radar Lampung

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
		✓											

Pemkot-Kejari Selamatkan PAD Pajak Rp2 Miliar

Kerja sama Pemkot-Kejari telah lama terjalin untuk meningkatkan PAD di sektor pajak.

DETA CITRAWAN

PEMERINTAH Kota Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2 miliar dari sektor pajak.

"Berhasil dikumpulkan kurang lebih sebesar Rp2 miliar di tahun 2020," kata Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandar Lampung Badri Tamam, Kamis (25/2).

Menurutnya, kerja sama dengan Kejari telah lama terjalin untuk melakukan pendampingan dan pengawasan guna meningkatkan pendapatan di sektor pajak.

"Kerja sama tidak hanya perihal pajak, tapi aset juga dalam rangka pemeliharaan aset. Atas dasar itu Pemkot memberikan penghargaan sebagai apresiasi kepada kejaksaan negeri, dan kerja sama ini akan terus berlanjut," kata dia.

Ia berharap, Pemkot dan Kejari semakin aktif menyadarkan para wajib pajak yang tidak taat. "Yang bandel bisa sadar dan taat membayar pajak karena ini untuk pembangunan," ujar dia.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung Abdullah Noer Deny mengaku mengalami banyak kendala saat mengawal pajak.



Yang bandel bisa sadar dan taat membayar pajak karena ini untuk pembangunan.

"Kalau kendala pasti ada namun kita berusaha secara luwes dan familiar, jadi sinergisitas antara Pemkot untuk meningkatkan PAD yang selama ini sudah meningkat namun tetap didukung, supaya ada peningkatan lagi, karena banyak pengusaha yang menunggak terutama di masa pandemi," katanya.

Tapping Box

Ia melanjutkan adanya penerapan alat perekam transaksi atau *tapping*

box yang sudah berjalan sejak dua tahun lalu efektif menertibkan para wajib pajak.

"Faktornya penunggakan pajak ini banyak, yaitu pelaksanaan tapping box belum mau pakai, harapan kita ini betul-betul bisa di terapkan di seluruh pelayanan dan jasa yang ada di Bandar Lampung, sehingga bisa didapat secara detail melalui sistem yang telah terstruktur," ujarnya.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadi penunggakan pembayaran pajak itu, Kejaksaan akan mengambil langkah bersama Pemkot berupa pencabutan alat registrasi dari pihak tempat usaha yang tidak mau memasang *tapping box*.

"Kalau sanksi dalam rangka pendapatan itu adalah sanksi tegasnya bisa pencabutan mesin mereka itu, kalau izin itu evaluasi dari Pemkot, tapi bisa juga apabila Pemkot meminta kejaksaan saran dan kita sebut layak di cabut maka bisa di cabut, dan kerja sama antara kejaksaan dan Pemkot ini akan terus terjalin," kata dia. (K2)